

DEFORESTASI DAN HAK ASASI MANUSIA



Hutan di ASEAN mencakup lebih dari 193 juta hektar, atau 44% dari luas daratan. Setiap hari, hutan memainkan peran penting dalam kehidupan kita dengan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional dan stabilitas lingkungan.

Namun, hutan di wilayah ini terancam, dan telah menyusut hampir 7 juta hektar, atau 3,4%, sejak 2013, menyebabkan pada hilangnya keanekaragaman hayati dengan laju yang mengkhawatirkan, kebakaran hutan besar-besaran, polusi, dan perubahan iklim. Banyak dari kerusakan ini terjadi pada skala industri demi untuk pertanian dan perkebunan tanaman komersial.

Dokumen ini memberi informasi dan langkah kunci bagi pembuat undang-undang di Asia Tenggara untuk memastikan perlindungan dan pengelolaan hutan, serta mengurangi polusi dan dampak iklim.

MENGAPA KITA PERLU MELINDUNGI HUTAN UNTUK MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA?

UNTUK MELINDUNGI HAK ATAS KESEHATAN

Deforestasi, dengan meningkatkan paparan manusia terhadap satwa liar, menyebabkan peningkatan jumlah penyakit menular yang menyerang manusia, seperti virus COVID-19.

Kebakaran hutan yang digunakan dalam proses penanaman tanaman dapat menyebabkan lonjakan besar tingkat polusi yang berkenaan dengan penyakit pernapasan, serebrovaskular, dan kardiovaskular. Kematian tahunan global akibat kebakaran hutan diperkirakan 250-600.000 orang, sementara kebakaran hutan juga berdampak besar pada kematian bayi dan anak, kesejahteraan, dan tumbuh kembang anak.

Umat manusia bergantung pada 28.000 spesies tumbuhan obat, banyak di antaranya ditemukan di ekosistem hutan. Hutan juga berdampak positif pada kesehatan fisik dan mental masyarakat, dan banyak yang memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengannya.





MENJAMIN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN

Hutan sangat penting untuk pembangunan. Hutan menyediakan lebih dari 86 juta pekerjaan ramah lingkungan di seluruh dunia dan mendukung mata pencaharian bagi lebih banyak lagi.

Hutan yang sehat menyediakan makanan, nutrisi, air, tempat berteduh, dan peluang menghasilkan pendapatan yang menjadi jaring pengaman penting di masa sulit.

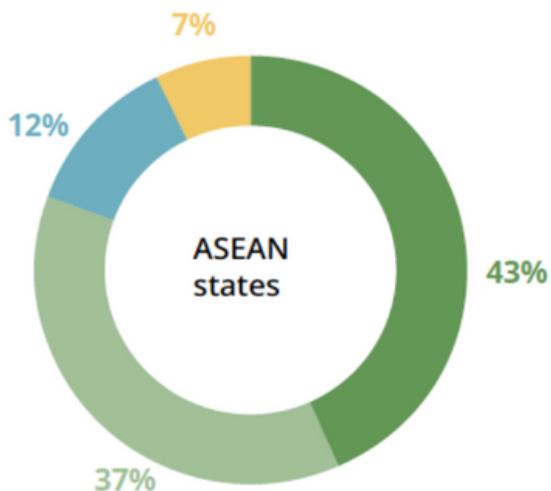
Hutan memasok air dan menyediakan habitat bagi banyak binatang penyerbuk yang penting dalam produksi dan keamanan pangan yang berkelanjutan. Diperkirakan 75% tanaman pangan utama dunia bergantung pada penyerbukan oleh binatang.

Sebaliknya, pengelolaan hutan yang tidak semestinya dan deforestasi memiliki biaya ekonomi yang sangat besar yang mencapai miliaran dolar karena meningkatnya penyakit, mitigasi kebakaran, dan operasi darurat, serta hilangnya sumber daya yang berharga.

MENGATASI PERUBAHAN IKLIM

Pengelolaan lahan dan hutan yang buruk merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca ASEAN (sekitar 43% pada tahun 2014) yang menyumbang perubahan iklim. Hutan ASEAN dan bagaimana pengelolaannya sangat penting bagi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Hutan dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim seperti cuaca ekstrim, banjir, badai, gelombang panas, dan kekeringan, serta menyediakan sumber daya alam yang membantu pemulihan.



EMISI GAS RUMAH KACA MENURUT SEKTOR UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN

(2014, DATA TERBARU YANG TERSEDIA)



Sumber: RECOFT, 2020, *Social forestry and climate change in the ASEAN region*, p.29



PERMASALAHAN

Ekspansi pertanian adalah pendorong utama deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati hutan. Berbagai macam kegiatan pertanian - pembakaran lahan, baik sebelum maupun sesudah panen, monokultur atau penggunaan pupuk kimia - menambah kerusakan lahan.

PBB telah meluncurkan berbagai prakarsa untuk mempromosikan perlindungan dan rehabilitasi hutan. Namun, hanya tujuh negara yang melaporkan pengurangan deforestasi ke Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).

Pandemi COVID-19 telah memberi gambaran bagaimana jalur deforestasi yang tidak berkelanjutan ini membahayakan masa depan kita bersama. Meskipun demikian, selama pandemi, kehilangan tutupan pohon meningkat 77% secara global karena negara-negara mendorong eksploitasi sumber daya untuk meningkatkan perekonomian mereka.

APA YANG HARUS TERJADI

TINGKATKAN PERLINDUNGAN HUTAN

Negara-negara anggota ASEAN harus mempercepat upaya perlindungan hutan dengan cara yang sejalan dengan hak asasi manusia, khususnya hak adat dan hak atas tanah adat. Salah satu pendekatan yang berhasil adalah mempromosikan perhutanan sosial dan pengalihan lahan ke status milik-komunitas untuk pengelolaan dan konservasi. Di ASEAN, luas hutan berstatus milik komunitas ini mencapai hampir 14 juta hektar, dua kali lipat dari luas pada 2010. Ini kecenderungan yang positif tetapi perlu percepatan.

PEMULIHAN HUTAN YANG TERDEGRADASI

Deforestasi telah menyebabkan menurunnya kapasitas hutan mengatur ekosistem dalam skala yang luas. Diperkirakan 60–80% hutan utuh telah terdegradasi pada tahun 2015. Enam puluh satu negara telah berjanji untuk merestorasi 170 juta hektar lahan hutan terdegradasi di bawah Tantangan Bonn (The Bonn Challenge), tetapi belum ada yang berasal dari ASEAN.

TRANSFORMASI SISTEM PANGAN

Perubahan transformasional diperlukan dalam cara kita mengelola hutan berikut keanekaragaman hayatinya, memproduksi dan mengonsumsi makanan kita, serta berinteraksi dengan alam. Adalah sebuah keharusan bahwa tata guna lahan harus diputuskan dengan mempertimbangkan nilai riil hutan. Ini membutuhkan dijalankannya, dalam skala luas, praktik agroforestri dan produksi yang berkelanjutan, pola makan yang lebih sehat, dikurangnya limbah makanan, dan memastikan komitmen agribisnis pada rantai komoditas yang bebas deforestasi.

APA YANG DAPAT DILAKUKAN ANGGOTA PARLEMEN?

Tingkat Global

- Dorong pemerintah Anda untuk bergabung dengan prakarsa-prakarsa PBB seperti Bonn Challenge dan integrasikan sasaran-sasaran mitigasi yang ambisius dalam penggunaan lahan dan deforestasi di dalam Nationally Determined Contribution (NDC) pada Persetujuan Paris.
- Bergabung dengan asosiasi anggota parlemen yang ingin memajukan perlindungan lingkungan seperti Ecocide Alliance, Global Renewables Congress dan ASEAN Parliamentarians for Human Rights.

Tingkat Nasional

- Mendorong pemerintah Anda membentuk legislasi yang mengatur dampak lingkungan perusahaan secara lintas-batas. Contohnya, antara lain, Undang-Undang Asap Lintas Batas 2014 Singapura (Singapore's Transboundary Haze Pollution Act, 2014).
- Mendorong negara Anda untuk mengadopsi pendekatan berbasis hak dalam pengelolaan kehutanan yang mempertimbangkan hak dan praktik penggunaan lahan oleh masyarakat adat, hak perempuan, dan melindungi hak atas kesehatan dan pembangunan berkelanjutan.
- Memastikan negara Anda memiliki target jangka pendek dan jangka panjang yang jelas mengenai: restorasi hutan, konservasi hutan dengan pendekatan perhutanan sosial, dan mitigasi perubahan iklim akibat penggunaan lahan.
- Mendorong pemerintah Anda untuk membentuk undang-undang yang memberi insentif dan atau sanksi tegas pada perusahaan yang belum membuat komitmen nol-deforestasi.

Tingkat Lokal

- Bertemu dengan konstituen untuk mendapatkan keprihatinan dan umpan balik mereka tentang isu-isu seperti kebakaran hutan, perubahan iklim, polusi atau hilangnya keanekaragaman hayati.

REKOMENDASI UNTUK NEGARA

Kamboja

Indeks risiko iklim: **115** dari 181 negara

DARI 2001 HINGGA 2019, KAMBOJA KEHILANGAN 2,31 JUTA HA TUTUPAN POHON, SETARA DENGAN 26% PENURUNAN TUTUPAN POHON SEJAK 2000, DAN 973 JUTA TON EMISI CO₂.

- Pengelola hutan masyarakat dalam program perhutanan sosial harus diberi kompensasi yang memadai atas partisipasi mereka dalam restorasi hutan atau kegiatan perlindungan hutan, dan memiliki peran dan hak yang jelas.
- Pastikan terpenuhinya target peningkatan tutupan hutan menjadi 60% dari total luas lahan dan pengalokasian 2 juta hektar hutan untuk hutan rakyat pada tahun 2029 sebagaimana tertuang dalam Program Hutan Nasional 2010-2029.
- Pastikan insentif yang memadai bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana hutan masyarakat dengan menyediakan lahan yang tidak terlalu terdegradasi, memiliki kapasitas produksi yang memadai, dan dengan memberikan pelatihan bagi masyarakat dan staf pemerintah daerah untuk mengembangkan, menyerahkan dan memverifikasi rencana pengelolaan hutan kemasyarakatan.
- Meningkatkan upaya dan pendanaan yang dialokasikan untuk penanggulangan pembalakan liar.
- Pastikan perusahaan berkomitmen untuk tidak melakukan deforestasi dan bahwa penegakan dan tindakan hukum diambil untuk memberi sanksi kepada perusahaan yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat rantai pasokan mereka. Menerapkan sanksi yang keras seperti membatalkan izin usaha atas perampasan tanah dan perambahan lahan.

Indonesia

Indeks risiko iklim: **50** dari 181 negara

DARI 2001 HINGGA 2019, INDONESIA KEHILANGAN 26,8 JUTA HA TUTUPAN POHON. INI ADALAH 17% PENURUNAN TUTUPAN POHON SEJAK TAHUN 2000, DAN 10.9GT EMISI CO₂.

- Tingkatkan pemantauan resmi sistem kualitas udara dan buka data akses ke publik.
- Lindungi, basahkan dan pulihkan lahan gambut dan batalkan semua rencana pengalihan penggunaan lahan gambut.
- Publikasikan peta rinci batas perkebunan perusahaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, dan publikasikan audit rutin pemerintah atas kepatuhan perusahaan perkebunan terhadap kebakaran hutan dan peraturan deforestasi.
- Pastikan perusahaan berkomitmen untuk tidak melakukan deforestasi dan bahwa penegakan dan tindakan hukum diambil untuk memberi sanksi kepada perusahaan yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat rantai pasokan mereka. Menerapkan sanksi yang keras seperti membatalkan izin usaha atas perampasan tanah dan perambahan lahan.
- Pastikan terpenuhinya target pengalihan 12,7 juta hektar hutan negara untuk pengelolaan masyarakat sesuai pengumuman pada tahun 2016.

Malaysia

Indeks risiko iklim: **44** dari 181 negara

DARI 2001 HINGGA 2019, MALAYSIA KEHILANGAN 8,12 JUTA HA TUTUPAN POHON, SETARA DENGAN PENURUNAN 28% TUTUPAN POHON SEJAK 2000, DAN EMISI CO₂ 3,55GT.

- Malaysia harus mengambil tindakan terhadap perusahaan di wilayah hukumnya sendiri yang bertanggung jawab atas kebakaran di Indonesia. Ini bisa mengambil contoh UU Asap Lintas Batas 2014 Singapura (Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014), yang berlaku secara ekstrateritorial.
- Tetapkan target lahan untuk dialihkan ke komunitas lokal demi perhutanan sosial.
- Integrasikan janji mitigasi iklim penggunaan lahan dan deforestasi dalam NDC.

Myanmar

Indeks Risiko Iklim negara: **69** dari 181 negara

SEJAK 2001 SAMPAI 2019, MYANMAR KEHILANGAN 3,69 JUTA HEKTAR TUTUPAN POHON, SETARA DENGAN PENURUNAN 8,6% DAN 1,4 GT EMISI CO₂

- Tinjau dan amandemen Undang-Undang Pengelolaan Tanah Perawan, Bera, dan Kosong untuk menghormati dan melindungi hak tanah adat dan mencegah deforestasi lebih lanjut.
- Wujudkan kepemilikan hutan yang kuat, jelas, dan transparan berdasarkan pengakuan hak atas tanah adat.
- Pastikan terpenuhinya target-target pengalihan kawasan hutan ke masyarakat lokal sesuai dengan Strategi Kehutanan Masyarakat 2018-2030.
- Pastikan perusahaan berkomitmen untuk tidak melakukan deforestasi dan menegakkan penilaian dan langkah-langkah hukum untuk memberi sanksi kepada perusahaan yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat rantai pasokan mereka. Terapkan sanksi administratif yang keras seperti pembatalan izin.

Thailand

Indeks risiko iklim negara*: **10** dari 181 negara

*2019

DARI TAHUN 2000 HINGGA 2018, THAILAND KEHILANGAN 1,8 JUTA HEKTAR TUTUPAN POHON. INI ADALAH PENURUNAN TUTUPAN POHON SEBESAR 9,4% SEJAK TAHUN 2000

- Promosikan keberlanjutan lingkungan hidup di semua aspek rantai pasokan untuk semua produk yang terkait dengan deforestasi, dan memastikan perusahaan berkomitmen untuk tidak melakukan deforestasi.
- Publikasikan peta rinci batas-batas perusahaan perkebunan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Menerapkan tindakan hukum untuk memberi sanksi kepada perusahaan yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat rantai pasokan mereka.
- Pastikan terpenuhinya target pengalihan kawasan hutan ke masyarakat lokal.

DARI 2001 HINGGA 2019, VIETNAM KEHILANGAN 2,86 JUTA HA TUTUPAN POHON, SETARA DENGAN 17% PENURUNAN TUTUPAN POHON DAN 1,03 GT EMISI CO₂.

- Mengakui dan memperjelas hak hukum dan peran rumah tangga dan masyarakat berdasarkan kebijakan perhutanan sosial.
- Reformasi Strategi Kehutanan Vietnam 2021-2030 untuk meningkatkan nilai, kualitas, dan keberlanjutan produk pertanian melalui perluasan volume.
- Tingkatkan investasi pada kegiatan penanaman, perlindungan, dan pengayaan hutan, serta investasi pada peralatan perlindungan hutan seperti peralatan dan manajemen kebakaran.
- Pastikan perusahaan berkomitmen untuk tidak melakukan deforestasi dan menegakkan penilaian dan tindakan hukum yang diambil untuk memberi sanksi kepada perusahaan yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat rantai pasokan mereka.

KETERANGAN LEBIH JAUH:

- [Manifesto](#) dan [seri webinar](#) APHR tentang langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh para Anggota Parlemen ASEAN untuk memajukan dan menyesuaikan pemulihan ekonomi dari COVID-19.
- FAO and UNEP. 2020. The State of the World's Forests 2020. Forests, biodiversity and people. Rome.
- RECOFT, social forestry and climate change in the ASEAN region, situational analysis, 2020.

Jika anda berminat atas informasi atau dukungan lebih jauh untuk membahas isu-isu di atas di negara dan parlemen Anda, silakan menghubungi Cannelle Gueguen-Teil di: cannelle@aseanmp.org atau info@aseanmp.org